



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 01/PM.2/2009

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA

UMUM TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/ atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/ atau lintas wilayah.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Ketentuan penggunaan Standar Biaya Umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 04 Maret 2009

a.n MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL
ANGGARAN,

ANNY RATNAWATI
NIP 131669947



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	1
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA	2
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA	3
4	HONORARIUM PENGELOLA PNB	3
5	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	4
6	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN	4
7	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI	4
8	HONORARIUM PENYULUH NON PNS	4
9	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	4
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN	4
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN / TIM SEKRETARIAT	5
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	5
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH	5
14	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN WEBSITE	5
15	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI	5
16	HONORARIUM SIDANG / KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL / REGIONAL / MULTILATERAL)	6
17	HONORARIUM WORKSHOP / SEMINAR / SOSIALISASI / SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL	6
18	SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI	6
19	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN	6
20	HONORARIUM INSTRUKTUR	7
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
22	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	7
23	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	7
24	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	7
25	SATUAN BIAYA DEKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL	7
26	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN	7
27	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	7
28	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT	7
29	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN	8
30	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI	8
31	PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	8
32	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR	8
33	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI	9
34	SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/TARUNA	9
35	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/ PERAWAT	9
36	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/ PESURUH	9
37	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM	9
38	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM	9
39	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	9
40	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	9
41	SATUAN BIAYA PENCETAKAN	9
42	SATUAN BIAYA PENJILIDAN	10
43	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	10
44	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	10
45	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN MESIN FOTOKOPI	10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
46	SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN	11
47	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	12
48	SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, UANG TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	13
49	SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (D.I D.III DAN D.IV - S1)	16
50	SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (S2/Sp-1 DAN S3/Sp-2)	17
51	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	18
52	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	21
53	SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	22
54	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	23
55	PENJELASAN LAMPIRAN SBU TAHUN ANGGARAN 2010	26

✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	230,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	345,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	400,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	460,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	515,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	575,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	630,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	745,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	920,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	1,145,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,375,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,720,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2,060,000	
	1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	200,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	290,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	345,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	400,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	460,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	515,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	575,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	690,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	800,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	975,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,200,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,490,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,835,000	
	1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	175,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	260,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	320,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	345,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	400,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	460,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	490,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	575,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	800,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	860,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,030,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,320,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,545,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.	BENDAHARA PENGELUARAN / PEMEGANG UANG MUKA (PUM)			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	165,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	240,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	290,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	325,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	365,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	OB	400,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	460,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	550,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	690,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	800,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	975,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,200,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,490,000	
1.5.	STAF PENGELOLA			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	115,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	175,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	205,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	230,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	260,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	290,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	320,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	375,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	460,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	575,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	690,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	860,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,030,000	
2.	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	180,000	
2.2.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	365,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OP	545,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	OP	640,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	725,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	820,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	910,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	1,000,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	1,185,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	1,450,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,815,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	2,180,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	2,725,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	275,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OP	340,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	OP	475,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	545,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	605,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	665,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	750,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	880,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	1,090,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,365,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	1,635,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	2,040,000	
2.4.	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	240,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.200 juta	OP	340,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	OP	475,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	545,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	605,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	665,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	750,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	880,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	970,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,090,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	1,450,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	2,040,000	
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA			
	3.1. Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp.500 juta atau jasa konsultan Rp. 50 juta sd. 200 juta	OP	230,000	
	3.2. Pengadaan barang di atas Rp. 500 juta atau jasa konsultan di atas Rp. 200 juta	OP	350,000	
4	HONORARIUM PENGELOLA PNB			
	4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	515,000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	630,000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	690,000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	800,000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	OB	920,000	
	4.2. BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	345,000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	460,000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	575,000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	690,000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	OB	800,000	
	4.3. SEKRETARIAT / ANGGOTA Sekretariat / Anggota , maksimum 5 orang	OB	230,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT			
	5.1 Pemimpin Kegiatan	OB	300,000	
	5.2 Staf Kegiatan	OB	150,000	
6	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN			
	6.1 Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50,000	
	6.2 Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	45,000	
	6.3 Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35,000	
	6.4 Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30,000	
	6.5 Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	27,500	
	6.5 Pembantu Peneliti	OJ	20,000	
	6.6 Pengolah Data	Penelitian	1,330,000	
	6.7 Petugas Survey	Orang/Responden	7,000	
	6.8 Pembantu Lapangan	OH	67,000	
	6.9 Koordinator Peneliti	OB	365,000	
	6.10 Sekretariat Penelitian	OB	260,000	
7	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI			
	7.1 Narasumber/Pembahas Utama :			
	a. Menteri / pejabat setingkat Menteri	OJ	1,400,000	
	b. Pejabat Eselon I	OJ	1,150,000	
	c. Pejabat Eselon II	OJ	850,000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	700,000	
	7.2 Moderator	OJ	575,000	
	7.3 Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	OJ	1,150,000	
8	HONORARIUM PENYULUH NON PNS			
	8.1 SLTA	OB	1,300,000	
	8.2 Sarjana Muda	OB	1,500,000	
	8.3 Sarjana	OB	1,650,000	
	8.4 Master (S.2)	OB	1,800,000	
9	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	OB	1,300,000	
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	10.1 Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Presiden			
	a. Pengarah	OB	2,500,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	2,250,000	
	c. Koordinator/Ketua	OB	2,000,000	
	d. Wakil Ketua	OB	1,750,000	
	e. Sekretaris	OB	1,500,000	
	f. Anggota	OB	1,500,000	
	10.2 Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Menteri			
	a. Pengarah	OB	1,500,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000	
	c. Ketua	OB	1,000,000	
	d. Wakil Ketua	OB	850,000	
	e. Sekretaris	OB	750,000	
	f. Anggota	OB	750,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Eselon I			
	a. Pengarah	OB	750,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000	
	c. Ketua	OB	650,000	
	d. Wakil Ketua	OB	600,000	
	e. Sekretaris	OB	500,000	
	f. Anggota	OB	500,000	
	10.4. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan KPA			
	a. Pengarah	OB	500,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	450,000	
	c. Ketua	OB	400,000	
	d. Wakil Ketua	OB	350,000	
	e. Sekretaris	OB	300,000	
	f. Anggota	OB	300,000	
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT			
	11.1 Penanggung Jawab / Pembina	OK	400,000	
	11.2 Ketua / Wakil ketua	OK	350,000	
	11.3 Sekretaris	OK	300,000	
	11.4 Anggota	OK	300,000	
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	12.1 Penanggung Jawab	Oter	400,000	
	12.2 Redaktur	Oter	300,000	
	12.3 Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	12.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000	
	12.5 Sekretariat	Oter	150,000	
	12.6 Pembuat artikel	Halaman	100,000	
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH			
	13.1 Penanggung Jawab	Oter	400,000	
	13.2 Redaktur	Oter	300,000	
	13.3 Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	13.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000	
	13.5 Sekretariat	Oter	150,000	
	13.6 Pembuat artikel	Halaman	75,000	
14	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
	14.1 Penanggung Jawab	OB	500,000	
	14.2 Redaktur	OB	450,000	
	14.3 Editor	OB	400,000	
	14.4 Web Admin	OB	350,000	
	14.5 Web Developer	OB	300,000	
	14.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000	
	14.7 Penerjemah	1500 karakter	85,000	
15	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI			
	15.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/ KPA			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	145,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	200,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	260,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	315,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	370,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.2	PEMEGANG KAS/ BENDAHARA			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	115,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	175,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	230,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	290,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	345,000	
15.3	JURU BAYAR/ STAF			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	90,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	140,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	200,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	260,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	315,000	
16	HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)			
	16.1 Pengarah	Orang/Hari	650,000	
	16.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	600,000	
	16.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	550,000	
	16.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	550,000	
	16.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	550,000	
	16.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	500,000	
	16.7 Koordinator	Orang/Hari	500,000	
	16.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	400,000	
	16.9 Sekretaris	Orang/Hari	400,000	
	16.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	350,000	
	16.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	350,000	
	16.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	300,000	
17	HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL			
	17.1 Pengarah	Orang/Hari	550,000	
	17.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	500,000	
	17.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	450,000	
	17.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	450,000	
	17.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	450,000	
	17.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	400,000	
	17.7 Koordinator	Orang/Hari	400,000	
	17.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	300,000	
	17.9 Sekretaris	Orang/Hari	300,000	
	17.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	250,000	
	17.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	250,000	
	17.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	200,000	
18	SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI			
	18.1 Nara Sumber Kelas A	Orang/Hari	\$ 300	
	18.2 Nara Sumber Kelas B	Orang/Hari	\$ 250	
	18.3 Nara Sumber Kelas C	Orang/Hari	\$ 200	
19	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN			
	19.1 Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	95,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.2	Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	110,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	250,000	
19.3	Setingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000	
20	HONORARIUM INSTRUKTUR	OJ	60,000	
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	21.1 UANG LEMBUR			
	a. Golongan I	OJ	7,000	
	b. Golongan II	OJ	9,000	
	c. Golongan III	OJ	11,000	
	d. Golongan IV	OJ	13,000	
	21.2 UANG MAKAN LEMBUR	Orang	20,000	
22	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	OH	110,000	
23	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	23.1 a. Kementerian Negara/Lembaga Dalam Negeri yang Mempunyai Kurang dari 40 Pegawai Diberikan Maksimal	Paket/Tahun	34,800,000	
	b. Kementerian Negara/Lembaga Dalam Negeri yang Mempunyai Lebih dari 40 Pegawai	OT	870,000	
	23.2 Perwakilan RI di Luar Negeri	OT	\$ 1.270	
24	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	OH	20,000	
25	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL			
	25.1 Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu)	Peserta/ Angkatan	19,000,000	
	25.2 Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 minggu)	Peserta/ Angkatan	13,240,000	
	25.3 Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 minggu)	Peserta/ Angkatan	11,600,000	
26	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	26.1 Golongan III (Lama Diklat 22 hari)			
	a. CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)	Peserta/ Angkatan	2,415,000	
	b. CPNS Eks Honoror (Lama Diklat 24 hari)	Peserta/ Angkatan	3,645,000	
	26.2 Golongan I & II			
	a. CPNS Reguler (Lama Diklat 10 hari)	Peserta/ Angkatan	1,650,000	
	b. CPNS Eks Honoror (Lama Diklat 19 hari)	Peserta/ Angkatan	2,670,000	
27	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	7,500	
28	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	28.1 RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA			
	a. Makan	Orang/Kali	40,000	
	b. Snack	Orang/Kali	15,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	28.2 RAPAT BIASA			
	a. Makan	Orang/Kali	26,000	
	b. Snack	Orang/Kali	10,000	
29	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	29.1 Anggota TNI/POLRI Non Organik			
	a. Ops. Pasukan termasuk crew kapal laut/terbang	OH	30,000	
	b. Dikma TNI/Polri	OH	24,000	
	c. Operasi dan Latihan/Diklat Lainnya/Pra Tugas Ops.	OH	24,000	
	d. Tahanan Anggota TNI/Polri	OH	19,000	
	e. Anggota yang sakit	OH	21,000	
	29.2 Narapidana / Tahanan			
	a. Wilayah I	OH	10,500	
	b. Wilayah II	OH	11,500	
	c. Wilayah III	OH	12,500	
	29.3 Tahanan Kejaksaan/Polri	OH	15,000	
	29.4 Tahanan Imigrasi	OH	15,000	
	29.5 Pasien Rumah Sakit	OH	18,000	
	29.6 Anak asuhan (Panti)	OH	18,000	
	29.7 Tuna Sosial	OH	18,000	
	29.8 Mahasiswa/Siswa Sipil	OH	18,000	
	29.9 Mahasiswa Semi Militer	OH	21,000	
	29.10 ABK Aktif	OH	21,000	
	29.11 ABK Cadangan	OH	15,000	
	29.12 Rescue Team	OH	21,000	
	29.13 Pengamat Laut	OH	18,000	
30	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI			
	30.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	M2/Tahun	80,000	
	30.2 Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/Tahun	10,000	
31	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI			
	31.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	M2/tahun	\$ 80	
	31.2 Pemeliharaan Wisma Duta/Konsul	M2/tahun	\$ 80	
	31.3 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Wisna Duta/ Konsul	M2/tahun	\$ 9	
32	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR			
	32.1 Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	26,000,000	
	b. Kendaraan Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	19,900,000	
	c. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	18,150,000	
	d. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	16,350,000	
	e. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3,000,000	
	f. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan RI di LN	buah/tahun	\$ 8,000	
	32.2 Speedboat	Unit/Tahun	12,600,000	
	32.3 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	45,000	
	32.4 Personal Komputer/Laptop, dan Printer	Unit/Tahun	700,000	
	32.5 AC Split	Unit/Tahun	350,000	
	32.6 Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/Tahun	4,550,000	
	32.8 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	36,300,000	
	32.9 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2	Unit/Tahun	24,800,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI	Orang/Stel	340,000	
34	SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/ TARUNA	Orang/Stel	280,000	
35	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/ PERAWAT	Orang/Stel	250,000	
36	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/ PESURUH	Orang/Stel	235,000	
37	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM	Orang/Stel	400,000	
38	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM			
	38.1 Toga Hakim Agung	Orang/Stel	3,550,000	
	38.2 Toga Hakim	Orang/Stel	570,000	
39	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	Orang/Stel	190,000	
40	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	40.1 Dari Bahasa Asing ke Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68,000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	135,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
	40.2 Dari Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	85,000	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	165,000	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
41	SATUAN BIAYA PENCETAKAN			
	41.1 Buku/Formulir dan sebagainya			
	a. Folio HVS, 1 muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	225	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	210	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	165	
	b. Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	250	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	235	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	185	
	c. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	545	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	375	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	315	
	d. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	575	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	400	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	345	
	e. Folio Edisi Lux (art paper) 1 warna			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	575	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	400	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	345	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.2	Leaflet / Brosur			
	- Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka / 2 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4,885	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	2,760	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	1,380	
41.3	Poster (min 75 x 50 cm2)			
	- Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	8,165	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	5,400	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	2,875	
41.4	Buletin (min 12 lembar)			
	- Folio HVS, 60 gram			
	- Oplah <= 300 eksemplar	Halaman	345	
	- Oplah > 300 eksemplar	Halaman	245	
41.5	Cover Buku (2 warna)			
	- Oplah 100 - 500	Halaman	5,520	
	- Oplah > 500	Halaman	5,290	
41.6	Cover Buku (4 warna)			
	- Oplah 100 - 500	Halaman	8,970	
	- Oplah > 500	Halaman	7,185	
42	SATUAN BIAYA PENJILIDAN	Eksemplar	10,000	
43	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1,000,000	
44	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL			
44.1	Pejabat Negara	Unit	500,000,000	
44.2	Pejabat Eselon I	Unit	350,000,000	
44.3	Operasional Kantor/Lapangan			
	a. Bus Roda 6	Unit	750,000,000	
	b. Roda 6/ Tiga per empat	Unit	475,000,000	
	c. Roda 4/ Mimibus	Unit	250,000,000	
	d. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit	300,000,000	
	e. Pick up	Unit	130,000,000	
	f. Roda 2	Unit	20,000,000	
	g. Motor Trail	Unit	25,000,000	
45	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN MESIN FOTOKOPI			
45.1	Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	520,000	
45.2	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	Unit/Hari	1,700,000	
45.3	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	Unit/Hari	2,550,000	
45.4	Sewa Mesin Fotokopi	Bulan/Unit	3,278,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- II -

46 SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN

(dalam rupiah/hari)

NO.	PROVINSI	RUANG BESAR	RUANG SEDANG	RUANG KECIL	GEDUNG PERTEMUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,000,000	2,000,000	1,500,000	3,000,000
2	SUMATERA UTARA	4,000,000	2,000,000	1,000,000	8,000,000
3	RIAU	3,250,000	2,000,000	1,000,000	5,000,000
4	KEPULAUAN RIAU	2,500,000	1,500,000	1,000,000	5,000,000
5	JAMBI	3,000,000	2,500,000	1,500,000	4,000,000
6	SUMATERA BARAT	2,500,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000
7	SUMATERA SELATAN	2,000,000	1,500,000	1,000,000	6,000,000
8	LAMPUNG	3,000,000	1,500,000	1,000,000	8,000,000
9	BENGKULU	2,000,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
10	BANGKA BELITUNG	2,000,000	1,500,000	1,000,000	4,000,000
11	BANTEN	5,500,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000
12	JAWA BARAT	3,750,000	2,000,000	1,250,000	10,000,000
13	D.K.I. JAKARTA	3,500,000	2,500,000	1,250,000	22,000,000
14	JAWA TENGAH	6,000,000	3,500,000	2,000,000	7,000,000
15	D.I. YOGYAKARTA	3,000,000	2,000,000	1,500,000	5,000,000
16	JAWA TIMUR	4,500,000	3,000,000	1,500,000	10,000,000
17	BALI	4,500,000	3,500,000	2,000,000	7,000,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	7,500,000	2,500,000	1,500,000	6,000,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2,000,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
20	KALIMANTAN BARAT	2,700,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
21	KALIMANTAN TENGAH	2,000,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000
22	KALIMANTAN SELATAN	4,500,000	2,400,000	1,800,000	15,000,000
23	KALIMANTAN TIMUR	5,250,000	2,800,000	1,750,000	4,500,000
24	SULAWESI UTARA	5,000,000	3,100,000	2,500,000	5,000,000
25	GORONTALO	2,000,000	1,500,000	1,000,000	5,000,000
26	SULAWESI BARAT	2,000,000	1,500,000	1,000,000	3,500,000
27	SULAWESI SELATAN	3,500,000	1,800,000	1,000,000	7,000,000
28	SULAWESI TENGAH	4,500,000	2,100,000	1,200,000	4,000,000
29	SULAWESI TENGGARA	2,500,000	1,750,000	1,000,000	3,250,000
30	MALUKU	4,500,000	3,500,000	1,500,000	5,000,000
31	MALUKU UTARA	5,000,000	3,000,000	1,200,000	5,000,000
32	PAPUA	4,000,000	2,500,000	1,000,000	8,000,000
33	IRIAN JAYA BARAT	6,000,000	3,500,000	2,000,000	8,000,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

47 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROPINSI	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	300,000
2.	SUMATERA UTARA	300,000
3.	RIAU	300,000
4.	KEPULAUAN RIAU	300,000
5.	JAMBI	300,000
6.	SUMATERA BARAT	300,000
7.	SUMATERA SELATAN	300,000
8.	LAMPUNG	300,000
9.	BENGKULU	300,000
10.	BANGKA BELITUNG	300,000
11.	BANTEN	300,000
12.	JAWA BARAT	350,000
13.	D.K.I. JAKARTA	450,000
14.	JAWA TENGAH	300,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350,000
16.	JAWA TIMUR	350,000
17.	BALI	400,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350,000
20.	KALIMANTAN BARAT	300,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	300,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	300,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	350,000
24.	SULAWESI UTARA	300,000
25.	GORONTALO	300,000
26.	SULAWESI BARAT	300,000
27.	SULAWESI SELATAN	350,000
28.	SULAWESI TENGAH	300,000
29.	SULAWESI TENGGARA	300,000
30.	MALUKU	300,000
31.	MALUKU UTARA	300,000
32.	PAPUA	450,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	400,000

47/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

48 SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA/KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KET
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
AMERIKA UTARA							
1	Amerika Serikat	New York	523	470	415	342	
2	Kanada	Ottawa	443	401	366	306	
AMERIKA SELATAN							
3	Argentina	Buenos Aires	391	274	240	240	
4	Mexico	Mexico City	425	315	280	280	
5	Kuba	Havana	402	302	259	220	
6	Venezuela	Caracas	460	320	285	285	
7	Brazil	Brazillia	432	338	289	240	
8	Chile	Santiago	411	313	268	221	
9	Columbia	Bogota	382	278	238	220	
10	Peru	Limma	379	274	235	220	
11	Suriname	Paramaribo	394	292	250	206	
EROPA BARAT							
12	Kerajaan Inggris	London	583	531	430	430	
13	Norwegia	Oslo	513	462	286	285	
14	Perancis	Paris/Marseilles	508	461	380	380	
15	Belgia	Brussei	462	416	280	280	
16	Belanda	Den Haag	459	413	270	270	
17	Swiss	Bern/Jenewa	505	453	320	320	
18	Rep. Federasi Jerman	Berlin/Hamburg	439	408	280	280	
19	Austria	Wina	500	450	316	316	
20	Denmark	Kopenhagen	468	424	273	240	
21	Spanyol	Madrid	453	410	285	285	
22	Yunani	Athena	418	376	240	240	
23	Portugal	Lisabon	421	379	240	240	
EROPA TIMUR DAN EROPA UTARA							
24	Finlandia	Helsinki	449	406	352	312	
25	Italia	Roma/ Vatikan	516	469	370	370	
26	Swedia	Stockholm	462	433	340	340	
27	Rusia	Moscow	552	509	405	405	
28	Bulgaria	Sofia	402	364	318	283	
29	Czech	Praha	422	387	329	292	
30	Hongaria	Budapest	417	378	337	299	
31	Polandia	Warsawa	397	358	311	276	
32	Rumania	Bukharest	412	378	311	276	
33	Yugoslavia	Beograd	397	358	311	276	
34	Ukraina	Kiev	421	379	326	289	
35	Uzbekistan	Tashkent	388	349	285	253	
36	Slovakia	Bratislava	425	384	333	296	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA / KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KET
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AFRIKA						
37	Algeria	Aljazair	338	305	285	285	
38	Maroko	Rabat	300	248	190	190	
39	Tunisia	Tunis	289	238	185	185	
40	Nigeria	Abuja	357	310	290	290	
41	Senegal	Dakar	330	273	204	200	
42	Ethiopia	Addis Ababe	308	254	190	166	
43	Kenya	Nairobi	330	273	204	195	
44	Madagaskar	Tananarivo	292	241	180	180	
45	Tanzania	Dar Es Salaam	326	269	201	181	
46	Zimbabwe	Harare	281	241	214	214	
47	Namibia	Windhoek	296	244	183	160	
48	Afrika Selatan	Cape Town/Pretoria	300	248	200	200	
49	Sudan	Khartoum	338	279	208	183	
50	Libya	Tripoli	304	251	187	164	
	TIMUR TENGAH						
51	Mesir	Cairo	364	270	210	189	
52	Irak	Baghdad	393	280	218	200	
53	Arab Suriah	Damascus	354	254	198	195	
54	Saudi Arabia	Riyadh/Jeddah	387	273	213	200	
55	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	455	320	300	300	
56	Kuwait	Kuwait	402	280	255	255	
57	Yordania	Amman	361	251	195	195	
58	Turki	Ankara	361	267	208	187	
59	Iran	Teheran	347	257	200	180	
60	Yaman	Sana'a	349	238	195	195	
61	Libanon	Beirut	353	264	205	185	
62	Qatar	Doha	382	273	213	195	
	ASIA TENGAH DAN ASIA TIMUR						
63	India	New Delhi/Mumbai	348	260	240	240	
64	Bangladesh	Dacca	335	193	165	165	
65	Pakistan	Karachi/Islamabad	339	200	180	180	
66	Srilanka	Colombo	344	198	165	165	
67	Hongkong	Hongkong	468	317	285	285	
68	Jepang	Tokyo/Osaka	515	300	260	260	
69	Korea Selatan	Seoul	417	323	295	295	
70	Korea Utara	Pyong Yang	391	235	205	205	
71	Rep.Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	374	235	205	205	
72	Kamboja	Phnom Penh	292	220	195	195	
73	Afganistan	Kaboul	381	223	171	171	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA/KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KET
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ASIA TENGGARA						
74	Philipina	Manila/Davao City	408	275	220	220	
75	Singapura	Singapore	420	287	222	220	
76	Malaysia	Kuala Lumpur/Kuching	377	250	210	210	
77	Thailand	Bangkok/Songkhla	388	272	209	200	
78	Myanmar	Yangoon	364	247	195	195	
79	Laos	Vientiane	376	259	200	195	
80	Vietnam	Hanoi/Ho Chi Minh	379	262	202	195	
81	Brunei Darussalam	Bandar S Begawan	370	253	195	195	
	ASIA PASIFIK						
82	Australia	Sydney/Canberra	435	400	270	270	
83	Selandia Baru	Wellington	388	243	220	220	
84	Kaledonia Baru	Noumea	421	384	274	223	
85	Papua Nugini	Port Moresby/Vanimo	381	350	235	191	
86	Timor Leste	Dili	388	351	227	195	
87	Fiji	Suva	359	326	219	178	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

49 SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (D.I D.III DAN D.IV - S1)

NO.	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN		KETERANGAN
		D.I - D.III	D.IV - S1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Disertai bukti pengeluaran
II	Transport 1. Transport Awal Program 2. Transport Akhir Program	Sesuai pengeluaran Idem	Sesuai pengeluaran Idem	Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi
III	Tunjangan Awal Program/Akhir Program	Maksimal 6 hari	Maksimal 6 hari	Tunjangan diberikan dalam bentuk tunjangan harian
IV	Uang Kuliah 1. Biaya Alih Tahun (bila ada) 2. Uang Kuliah/semester (maksimum)	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	- Disertai bukti pengeluaran - Sesuai ketentuan pada masing-masing PTN setempat dan disertai bukti pengeluaran.
V	Waktu Kuliah (Maksimum)	D I = 3 Semester D II = 5 Semester D III = 7 Semester	D IV = 10 Semester S 1 = 11 Semester	
VI	Tunjangan Biaya Hidup : Tunjangan Biaya Hidup :	Rp. 800.000,-/bulan	Rp. 850.000,-/bulan	
VII	Biaya Operasional 1. Transport Lokal 2. ATK 3. Sewa Komputer	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 45.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 60.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	
VIII	Tunjangan Buku dan Referensi (Per Tahun) 1. Buku Utama 2. Manual 3. Diklat 4. Fotokopi artikel 5. Langganan e-mail, virtual library + disket	D I = 3 Buku, 10 Diklat D II = 6 Buku, 20 Diklat D III = 10 Buku, 20 Diklat Rp.40.000,-/buku Rp.40.000,-	20 Buku + 50 Diklat Rp.55.000,-/buku Rp.55.000,-	Maksimum Rp.60.000,-/buku Total tunj. maksimum Rp. 1 juta batas maksimum
IX	Tunjangan Riset 1. Proposal ATK 2. Penelitian a. Eksperimental : 1) Laboratorium 2) Lapangan b. Penelitian Non-Eksperimental : 1) Survey 2) Studi Numerik/Simulasi Komputer c. Penelitian Seri : 1) Survey 2) Penciptaan Karya Seni 3. Penyusunan Karya Ilmiah 4. Seminar 5. Ujian 6. Penggandaan/ Penjilidan : Proposal, Skripsi/ Tesis, Desertasi	- - - - - - - - - - - -	Rp130,000 Rp1,600,000 Rp1,200,000 Rp800,000 Rp3,300,000 Rp800,000 Rp2,300,000 Rp300,000 Rp70,000 Sesuai bukti Pengeluaran Rp40,000	Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal
X	Biaya Matrikulasi Biaya Matrikulasi	0	0	- Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

50. SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (S2/Sp-1 DAN S3/Sp-2)

NO.	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN		KETERANGAN
		S2/Sp-1	S3/Sp-2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Disertai bukti pengeluaran
II	Transport 1. Transport Awal Program 2. Transport Akhir Program	Sesuai pengeluaran Idem	Sesuai pengeluaran Idem	Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi
III	Tunjangan Awal Program/Akhir Program	Maksimal 6 hari	Maksimal 6 hari	Tunjangan diberikan dalam bentuk tunjangan harian
IV	Uang Kuliah 1. Biaya Alih Tahun (bila ada) 2. Uang Kuliah/semester (maksimum)	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	- Disertai bukti pengeluaran - Sesuai ketentuan pada masing-masing PTN setempat dan disertai bukti pengeluaran.
V	Waktu Kuliah (Maksimum)	5 Semester	8 Semester	
VI	Tunjangan Biaya Hidup : Tunjangan Biaya Hidup :	Rp. 1.050.000,-/bulan	Rp. 1.050.000,-/bulan	
VII	Biaya Operasional 1. Transport Lokal 2. ATK 3. Sewa Komputer	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 80.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 110.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	
VIII	Tunjangan Buku dan Referensi (Per Tahun) 1. Buku Utama 2. Fotokopi artikel 3. Langganan e-mail, virtual library + disket	S2 : 15 Buku + 50 Diklat Sp-1 : 9 Buku + 16 Manual Rp.165.000,- Rp860,000	S3 : 20 Buku Sp-2 : 15 Buku + 5 Manual Rp.200.000,- Rp860,000	Maksimum : Rp.60.000,-/buku Rp. 50.000,-/manual Rp. 55.000,-/diklat Total tunj. maksimum Rp. 1 juta batas maksimum
IX	Tunjangan Riset (akhir Program) 1. Proposal ATK 2. Penelitian a. Eksperimental : 1) Laboratorium 2) Lapangan b. Penelitian Non-Eksperimental : 1) Survey 2) Studi Numerik/Simulasi Komputer c. Penelitian Seri : 1) Survey 2) Penciptaan Karya Seni 3. Penyusunan Karya Ilmiah 4. Seminar 5. Ujian 6. Penggandaan/Penjiilidan : Proposal, Skripsi/Tesis, Desertasi	Rp130,000 Rp3,300,000 Rp2,300,000 Rp1,650,000 Rp440,000 Rp1,700,000 Rp4,600,000 Rp600,000 Rp70,000 Sesuai bukti Pengeluaran Rp700,000	Rp130,000 Rp4,800,000 Rp3,600,000 Rp2,400,000 Rp7,300,000 Rp2,300,000 Rp7,300,000 Rp1,100,000 Rp70,000 Sesuai bukti Pengeluaran Rp1,200,000	Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal
X	Biaya Matrikulasi Biaya Matrikulasi	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

51 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	MENTERI & SETINGKAT MENTERI		
		FULL BOARD	FULL DAY	HALF DAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	795,000	250,000	175,000
2.	SUMATERA UTARA	800,000	330,000	185,000
3.	RIAU	925,000	275,000	165,000
4.	KEPULAUAN RIAU	925,000	275,000	165,000
5.	JAMBI	795,000	285,000	200,000
6.	SUMATERA BARAT	795,000	250,000	175,000
7.	SUMATERA SELATAN	795,000	250,000	175,000
8.	LAMPUNG	750,000	180,000	160,000
9.	BENGGULU	795,000	285,000	200,000
10.	BANGKA BELITUNG	925,000	275,000	220,000
11.	BANTEN	1,030,000	300,000	250,000
12.	JAWA BARAT	1,040,000	285,000	210,000
13.	D.K.I. JAKARTA	1,150,000	365,000	305,000
14.	JAWA TENGAH	860,000	150,000	140,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	750,000	180,000	160,000
16.	JAWA TIMUR	1,300,000	420,000	310,000
17.	BALI	1,100,000	315,000	280,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	700,000	250,000	200,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	925,000	275,000	165,000
20.	KALIMANTAN BARAT	925,000	275,000	165,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	925,000	275,000	165,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	795,000	250,000	175,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	925,000	275,000	235,000
24.	SULAWESI UTARA	925,000	275,000	175,000
25.	GORONTALO	800,000	330,000	185,000
26.	SULAWESI BARAT	800,000	330,000	185,000
27.	SULAWESI SELATAN	850,000	275,000	145,000
28.	SULAWESI TENGAH	800,000	330,000	185,000
29.	SULAWESI TENGGARA	925,000	275,000	165,000
30.	MALUKU	850,000	365,000	305,000
31.	MALUKU UTARA	850,000	400,000	305,000
32.	PAPUA	1,120,000	400,000	300,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	850,000	400,000	305,000

PEJABAT ESELON I.....

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

PEJABAT ESELON I & II

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	PEJABAT ESELON I & II		
		FULL BOARD	FULL DAY	HALF DAY
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	620,000	190,000	150,000
2.	SUMATERA UTARA	690,000	210,000	145,000
3.	RIAU	600,000	220,000	135,000
4.	KEPULAUAN RIAU	630,000	250,000	160,000
5.	JAMBI	545,000	275,000	190,000
6.	SUMATERA BARAT	550,000	170,000	100,000
7.	SUMATERA SELATAN	610,000	215,000	175,000
8.	LAMPUNG	645,000	175,000	150,000
9.	BENGGKULU	545,000	275,000	190,000
10.	BANGKA BELITUNG	600,000	250,000	210,000
11.	BANTEN	600,000	210,000	180,000
12.	JAWA BARAT	600,000	275,000	200,000
13.	D.K.I. JAKARTA	735,000	280,000	220,000
14.	JAWA TENGAH	645,000	145,000	130,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	500,000	160,000	135,000
16.	JAWA TIMUR	660,000	240,000	140,000
17.	BALI	725,000	225,000	200,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	685,000	235,000	150,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	600,000	250,000	135,000
20.	KALIMANTAN BARAT	600,000	220,000	150,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	600,000	220,000	150,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	550,000	170,000	100,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	675,000	250,000	165,000
24.	SULAWESI UTARA	790,000	210,000	165,000
25.	GORONTALO	690,000	210,000	145,000
26.	SULAWESI BARAT	690,000	210,000	145,000
27.	SULAWESI SELATAN	615,000	265,000	135,000
28.	SULAWESI TENGAH	545,000	210,000	150,000
29.	SULAWESI TENGGARA	600,000	220,000	160,000
30.	MALUKU	735,000	255,000	220,000
31.	MALUKU UTARA	725,000	375,000	250,000
32.	PAPUA	700,000	215,000	170,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	670,000	240,000	130,000

PEJABAT ESELON III



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEJABAT ESELON III KE BAWAH

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	PEJABAT ESELON III KE BAWAH		
		FULL BOARD	FULL DAY	HALF DAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	375,000	150,000	130,000
2.	SUMATERA UTARA	365,000	195,000	135,000
3.	RIAU	485,000	185,000	110,000
4.	KEPULAUAN RIAU	400,000	240,000	120,000
5.	JAMBI	360,000	170,000	90,000
6.	SUMATERA BARAT	390,000	160,000	80,000
7.	SUMATERA SELATAN	370,000	185,000	165,000
8.	LAMPUNG	350,000	145,000	120,000
9.	BENGKULU	350,000	170,000	90,000
10.	BANGKA BELITUNG	400,000	240,000	120,000
11.	BANTEN	475,000	125,000	100,000
12.	JAWA BARAT	490,000	125,000	85,000
13.	D.K.I. JAKARTA	630,000	270,000	150,000
14.	JAWA TENGAH	470,000	110,000	95,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	360,000	150,000	125,000
16.	JAWA TIMUR	400,000	205,000	105,000
17.	BALI	565,000	200,000	175,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350,000	195,000	105,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	400,000	240,000	120,000
20.	KALIMANTAN BARAT	370,000	200,000	140,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	370,000	200,000	140,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	400,000	160,000	80,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	450,000	165,000	155,000
24.	SULAWESI UTARA	550,000	185,000	150,000
25.	GORONTALO	400,000	175,000	120,000
26.	SULAWESI BARAT	400,000	175,000	120,000
27.	SULAWESI SELATAN	550,000	180,000	110,000
28.	SULAWESI TENGAH	385,000	135,000	105,000
29.	SULAWESI TENGGARA	350,000	210,000	150,000
30.	MALUKU	375,000	130,000	95,000
31.	MALUKU UTARA	350,000	130,000	95,000
32.	PAPUA	450,000	145,000	120,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	500,000	200,000	120,000

1/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

- 21 -

52 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah/hari)

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NON SUITE				
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4,415,000	1,755,000	1,150,000	850,000	365,000	250,000
2.	SUMATERA UTARA	4,500,000	1,100,000	900,000	550,000	400,000	250,000
3.	RIAU	3,450,000	1,650,000	860,000	665,000	350,000	245,000
4.	KEPULAUAN RIAU	3,410,000	1,500,000	700,000	500,000	375,000	230,000
5.	JAMBI	4,000,000	1,010,000	960,000	560,000	280,000	200,000
6.	SUMATERA BARAT	4,235,000	1,750,000	1,030,000	600,000	330,000	275,000
7.	SUMATERA SELATAN	4,500,000	1,350,000	895,000	490,000	350,000	250,000
8.	LAMPUNG	3,300,000	1,700,000	680,000	560,000	330,000	260,000
9.	BENGKULU	1,295,000	675,000	555,000	425,000	390,000	225,000
10.	BANGKA BELITUNG	2,000,000	1,030,000	605,000	500,000	300,000	210,000
11.	BANTEN	3,250,000	1,550,000	1,100,000	700,000	430,000	280,000
12.	JAWA BARAT	2,250,000	1,650,000	1,200,000	825,000	435,000	300,000
13.	D.K.I. JAKARTA	8,715,000	1,450,000	880,000	610,000	470,000	355,000
14.	JAWA TENGAH	4,045,000	1,650,000	935,000	750,000	405,000	280,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	3,750,000	1,020,000	750,000	550,000	350,000	275,000
16.	JAWA TIMUR	3,785,000	1,560,000	960,000	590,000	385,000	275,000
17.	BALI	4,510,000	1,695,000	1,210,000	935,000	770,000	495,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	2,300,000	1,200,000	660,000	495,000	400,000	215,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,100,000	685,000	535,000	465,000	400,000
20.	KALIMANTAN BARAT	1,540,000	950,000	830,000	735,000	425,000	220,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	750,000	650,000	550,000	385,000	290,000	230,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4,250,000	1,250,000	1,150,000	600,000	340,000	250,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	3,070,000	1,305,000	1,225,000	560,000	435,000	310,000
24.	SULAWESI UTARA	3,200,000	1,380,000	1,240,000	575,000	450,000	250,000
25.	GORONTALO	1,320,000	1,030,000	820,000	660,000	410,000	240,000
26.	SULAWESI BARAT	800,000	660,000	550,000	440,000	345,000	295,000
27.	SULAWESI SELATAN	4,000,000	1,000,000	850,000	750,000	415,000	275,000
28.	SULAWESI TENGAH	1,920,000	1,210,000	785,000	440,000	330,000	200,000
29.	SULAWESI TENGGARA	1,550,000	875,000	720,000	440,000	385,000	295,000
30.	MALUKU	3,000,000	900,000	780,000	480,000	265,000	200,000
31.	MALUKU UTARA	2,300,000	1,250,000	900,000	495,000	320,000	255,000
32.	PAPUA	2,400,000	1,600,000	970,000	610,000	455,000	380,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	4,500,000	1,530,000	930,000	900,000	365,000	325,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

53 SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	TARIF TAXI
(1)	(2)	(3)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90,000
2.	SUMATERA UTARA	65,000
3.	RIAU	55,000
4.	KEPULAUAN RIAU	80,000
5.	JAMBI	55,000
6.	SUMATERA BARAT	110,000
7.	SUMATERA SELATAN	85,000
8.	LAMPUNG	95,000
9.	BENGGKULU	70,000
10.	BANGKA BELITUNG	55,000
11.	BANTEN	250,000
12.	JAWA BARAT	60,000
13.	D.K.I. JAKARTA	150,000
14.	JAWA TENGAH	40,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	50,000
16.	JAWA TIMUR	85,000
17.	BALI	85,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	30,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	50,000
20.	KALIMANTAN BARAT	80,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	65,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	90,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	275,000
24.	SULAWESI UTARA	80,000
25.	GORONTALO	65,000
26.	SULAWESI BARAT	100,000
27.	SULAWESI SELATAN	100,000
28.	SULAWESI TENGAH	35,000
29.	SULAWESI TENGGARA	90,000
30.	MALUKU	165,000
31.	MALUKU UTARA	110,000
32.	PAPUA	250,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	110,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

54 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
1	Bandar Seri Bagawan	645	533	463
2	Bangkok	1,147	947	823
3	Beijing	2,262	1,868	1,623
4	Canberra	2,886	2,383	2,070
5	Colombo	1,935	1,598	1,388
6	Darwin	1,719	1,419	1,233
7	Davao City	1,749	1,445	1,255
8	Dhaka	1,224	1,011	878
9	Hanoi	1,833	1,514	1,315
10	Ho Chi Minh	991	818	711
11	Hongkong	1,719	1,419	1,233
12	Islamabad	2,750	2,271	1,973
13	Johor Baharu	495	409	355
14	Karachi	2,611	2,156	1,873
15	Kinabalu	690	570	495
16	Kuala Lumpur	572	472	410
17	Manila	1,457	1,203	1,045
18	Melbourne	2,635	2,176	1,890
19	New Delhi	2,332	1,926	1,673
20	Nourmea	3,843	3,174	2,757
21	Osaka	2,572	2,124	1,845
22	Penang	697	576	500
23	Perth	2,126	1,755	1,525
24	Pnom Penh	1,217	1,005	873
25	Port Moresby	2,439	2,014	1,750
26	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
27	Rangoon	1,914	1,580	1,373
28	Seoul	2,421	1,999	1,737
29	Singapore	539	445	387
30	Sydney	2,635	2,176	1,890
31	Tokyo	2,558	2,112	1,835
32	Vanimo	3,318	2,740	2,380
33	Vientiane	1,367	1,129	981
34	Wellington	3,721	3,072	2,669
35	Yangon	1,468	1,212	1,053



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TIMUR TENGAH			
36	Abu Dhabi	4,180	3,191	2,727
37	Amman	5,433	4,148	3,545
38	Baghdad	5,433	4,148	3,545
39	Beirut	5,717	4,364	3,730
40	Damascus	5,096	3,890	3,325
	AFRIKA			
41	Doha	4,207	3,212	2,745
42	Jeddah	4,958	3,785	3,235
43	Kaboul	3,386	2,585	2,209
44	Kuwait	4,767	3,639	3,110
45	Riyadh	4,598	3,510	3,000
46	Sanaa	5,013	3,827	3,271
47	Teheran	4,475	3,416	2,920
48	Addis Ababa	7,472	5,704	4,955
49	Algeria	8,610	6,593	5,710
50	Aljazair	5,632	4,299	3,735
51	Antananarivo	11,779	8,991	7,811
52	Cairo	5,361	4,092	3,555
53	Cape Town	11,053	8,438	7,330
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Dar Es Salaam	8,645	6,599	5,733
56	Harare	8,666	6,615	5,747
57	Johannesburg	5,353	4,086	3,550
58	Khartoum	5,904	4,507	3,915
59	Lagos	10,281	7,848	6,818
60	Nairobi	7,966	6,081	5,283
61	Rabbat	6,205	4,737	4,115
62	Tripoli	6,551	4,092	3,555
63	Tunisia	6,296	4,806	4,175
64	Windhoek	11,325	8,645	7,510
	EROPA			
65	Amsterdam	6,177	3,834	3,331
66	Ankara	6,641	4,122	3,581
67	Attens	14,911	9,256	8,041
68	Beograd	9,921	6,158	5,350
69	Berlin	7,342	4,557	3,959
70	Bern	8,076	5,013	4,355



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	Bonn	6,960	4,320	3,753
72	Bratislava	6,993	4,341	3,771
73	Brussels	7,177	4,455	3,870
74	Bucharest	7,627	4,734	4,113
75	Copenhagen	6,917	4,294	3,730
76	Geneva	8,035	4,988	4,333
77	Hamburg	7,093	4,403	3,825
78	Helsinki	6,826	4,237	3,681
79	Kiev	9,630	5,978	5,193
80	Lisbon	6,274	3,894	3,383
81	London	7,701	4,781	4,153
82	Madrid	6,733	4,180	3,631
83	Marseilles	6,567	4,076	3,541
84	Moscow	9,537	5,920	5,143
85	Oslo	7,509	4,661	4,049
86	Paris	6,177	3,834	3,331
87	Praque	6,400	3,972	3,451
88	Rome	7,141	4,433	3,851
89	Sofia	6,567	4,076	3,541
90	Stockholm	6,366	3,952	3,433
91	Tashkent	13,617	8,453	7,343
92	Vienna	6,225	3,864	3,357
93	Warsawa	6,392	3,968	3,447
	AMERIKA - KANADA			
94	Bogota	12,348	9,426	7,713
95	Brazilia	11,966	9,134	5,970
96	Boenos Aires	11,966	9,134	5,970
97	Caracas	9,269	8,213	5,130
98	Chicago	7,189	5,488	3,587
99	Havana	14,702	11,223	7,335
100	Houston	7,197	5,494	3,591
101	Los Angeles	7,639	4,365	2,853
102	Mexico City	7,115	5,432	3,550
103	New York	10,049	5,742	3,753
104	Ottawa	5,374	4,103	3,357
105	Paramaribo	11,772	8,986	7,353
106	San Fransisco	7,419	4,240	2,771
107	Santiago de Chile	9,819	7,495	6,133
108	Toronto	2,931	2,238	1,831
109	Vancouver	6,721	4,393	2,871
109	Washington	11,463	6,550	3,743



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

PENJELASAN

LAMPIRAN STANDAR BIAYA UMUM 2010

1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing satuan kerja, berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji (PDG).KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji (PDG). Jumlah staf pengelola keuangan untuk masing-masing PPK paling banyak 2 (dua) orang.Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak <u>10 % dari pagu</u>.
2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa <ol style="list-style-type: none">Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa <u>sampai dengan</u> nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai <u>di atas</u> Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
3	Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan per <u>paket pekerjaan</u> .
4	Honorarium Pengelola PNBPNBP Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak. Jumlah sekretariat/anggota Pengelola PNBPNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBPNBP dalam 1 (satu) tahun <u>paling banyak 10%</u> dari penerimaan PNBPNBP masing-masing satker.
5	Honorarium Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas mengelola kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat di setiap satker. Jumlah staf kegiatan paling banyak <u>5 (lima)</u> orang.
6	Honorarium Kegiatan Penelitian Honorarium Peneliti dan Pembantu Peneliti (Non Fungsional Peneliti) diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal, paling banyak 4 (empat) jam sehari.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

7	<p>Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam unit eselon I/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari unit eselon I/satuan kerja lainnya.</p> <p>Pembahas Utama hanya dapat diadakan untuk kegiatan seminar.</p>
8	<p>Honorarium Penyuluh Non PNS</p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
9	<p>Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam dan Cleaning Service</p> <p>Satuan biaya bagi pegawai (non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk pengadaan pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak sebesar <u>15% (lima belas persen)</u>.</p>
10	<p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (<i>adhoc</i>) berdasarkan surat keputusan Presiden/ Menteri/Eselon I/KPA. Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</p>
11	<p>Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat</p> <p>Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi /pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
12	<p>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</p> <p>Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.</p>
13	<p>Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah</p> <p>Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
14	<p>Honorarium Tim Pengelola Website</p> <p>Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh Unit Eselon I/setara.</p>
15	<p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker Yang Hanya Mengelola Gaji</p> <p>Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk hanya untuk melakukan pengelolaan gaji di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

16	<p>Honorarium Sidang/Konferensi International - (KTM, SOM Bilateral/ Regional/ Multilateral)</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada PNS penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat Menteri atau <i>Senior Official</i> berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.</p> <p>Jumlah hari (maksimum) pemberian honor :</p> <p>Konferensi Tingkat Menteri (KTM) : 3 Hari sebelum kegiatan + Hari kegiatan + 2 Hari setelah kegiatan.</p> <p>Senior Official Meeting (SOM) : 2 Hari sebelum kegiatan + 1 Hari kegiatan + 2 Hari setelah kegiatan.</p> <p>PNS penyelenggara kegiatan <u>tidak diberikan</u> uang harian perjalanan dinas.</p>
17	<p>Honorarium Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala International</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada PNS penyelenggara kegiatan Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala International, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang .</p> <p>Jumlah hari (maksimum) pemberian honor :</p> <p>1 hari sebelum kegiatan + Hari kegiatan + 1 Hari setelah kegiatan.</p> <p>Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan.</p> <p>PNS penyelenggara kegiatan <u>tidak diberikan</u> uang harian perjalanan dinas.</p>
18	<p>Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri</p> <p>Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber non-PNS (WNI) untuk kegiatan Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri.</p> <p>Narasumber Kelas A : Narasumber non-PNS yang disetarakan dengan Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.</p> <p>Narasumber Kelas B : Narasumber non-PNS yang disetarakan dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, Duta Besar yang menjabat Kepala Perwakilan, PNS Gol IV/C keatas, Perwira tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.</p> <p>Narasumber Kelas C : Narasumber non-PNS yang disetarakan dengan PNS gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.</p> <p>Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara</p>
19	<p>Vakasi Penyelenggara Ujian</p> <p>Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk <u>ujian akhir</u> dan ujian semester.</p>
20	<p>Honorarium Instruktur</p> <p>Instruktur adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk Instruktur yang berasal dari non-PNS, satuan biayanya mengacu pada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
21	<p>Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur</p> <p>Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.</p> <p>Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

	<p>Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per-hari.Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% dari tarif lembur hari kerja.
22	<p>Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan dalam Kota</p> <p>Uang transport <u>dapat</u> diberikan kepada pegawai negeri sipil ataupun non pegawai yang melakukan kegiatan/pekerjaan di dalam batas satu wilayah kota untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi, dan atau kegiatan lain yang serupa. Untuk PNS, biaya tersebut dapat diberikan sepanjang :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak tersedia kendaraan dinas;- Disertai surat tugas;- Tidak bersifat rutin.
23	<p>Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran</p> <p>Satuan biaya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang dan jasa yang habis pakai yang secara langsung menunjang kegiatan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan, terdiri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai. Satker yang memiliki kurang dari 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan paling banyak Rp 34.800.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun. Sementara satker yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) pegawai dapat mengalokasikan sesuai indeks dikalikan dengan jumlah pegawai. Untuk Perwakilan RI di luar negeri, satuan biaya digunakan <u>khusus untuk</u> pengadaan alat tulis kantor (ATK).</p>
24	<p>Satuan Biaya Uang Makan PNS</p> <p>Uang makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.</p>
25	<p>Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural</p> <p>Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan pajak. Untuk Diklat Pim III dan IV satuan biaya <u>belum termasuk</u> biaya observasi lapangan.</p>
26	<p>Satuan Biaya Latihan Prajabatan</p> <p>Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya <u>belum termasuk</u> biaya perjalanan dinas peserta dan pajak.</p>
27	<p>Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh</p> <p>Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh. <u>Hanya</u> diberikan kepada pegawai fungsional seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray, dan petugas yang pekerjaannya berisiko tinggi serupa lainnya yaitu yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut. Misalnya : Petugas Reaktor Nuklir, Petugas SUTET dll.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

28	<p>Satuan Biaya Konsumsi Rapat</p> <p>Pengadaan makanan termasuk minuman dan <i>snack</i> untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/Eselon I/pejabat yang setara.</p>
29	<p>Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan</p> <p>Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan anggota TNI/POLRI, narapidana, tahanan, pasien rumah sakit, ABK dan lain-lain. Untuk pengadaan barang hasil olahan, satuan biaya sudah termasuk pajak.</p> <p>Untuk satuan biaya pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan dibedakan menurut wilayah sebagai berikut :</p> <p>Wilayah I : Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Lampung, Gorontalo, DIY, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Selatan</p> <p>Wilayah II : Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Jambi, NTT, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Banten</p> <p>Wilayah III : Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur dan NAD.</p> <p>Untuk mahasiswa/siswa yang menempuh pendidikan kedinasan dapat dialokasikan biaya pengadaan bahan makanan sepanjang mahasiswa/siswa tersebut diasramakan.</p> <p>Mahasiswa/Siswa Sipil, misalnya : Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas.</p> <p>Mahasiswa/Siswa Semi Militer, misalnya : Mahasiswa Penerbangan, Mahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Mahasiswa Perhubungan, Siswa AKABRI/AKPOL.</p>
30	<p>Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri</p> <p>Satuan biaya yang digunakan untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).</p>
31	<p>Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan untuk Perwakilan RI di Luar Negeri</p> <p>Satuan biaya yang digunakan untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor Perwakilan RI di luar negeri (termasuk atase teknis departemen di luar negeri) agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%(dua persen).</p>
32	<p>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Kantor</p> <p>Pemeliharaan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu asset. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, patroli jalan raya, dan speedboat sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM). Untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p>
33	<p>Satuan Biaya Pakaian Dinas / Kerja Resmi Pegawai</p> <p>Diperuntukkan bagi PNS pada satuan kerja yang tugas pokoknya berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif dan telah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per tahun</p> <p>Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

34	<p>Satuan Biaya Pakaian Dinas Mahasiswa/Taruna Diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan pada lembaga pendidikan tertentu. Penyediaannya telah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Disediakan paling banyak 1(satu) stel per tahun. Satuan biaya <u>sudah termasuk</u> atribut dan ongkos jahit.</p>
35	<p>Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter/Perawat Diperuntukkan bagi dokter/perawat dan penyediaannya secara selektif. Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per tahun. Satuan biaya <u>sudah termasuk</u> ongkos jahit.</p>
36	<p>Satuan Biaya Pakaian Sopir/Pesuruh Diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA. Dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. Satuan biaya <u>sudah termasuk</u> ongkos jahit.</p>
37	<p>Satuan Biaya Pakaian Satpam Pakaian satpam <u>sudah termasuk</u> perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) paling banyak dapat diberikan sebanyak 2 (dua) stel per tahun.</p>
38	<p>Satuan Biaya Toga Hakim Satuan biaya <u>tidak termasuk</u> atribut/perlengkapan.</p>
39	<p>Satuan Biaya Toga Mahasiswa Diperuntukkan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi negeri. Satuan biaya <u>sudah termasuk</u> atribut/perlengkapan.</p>
40	<p>Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan Biaya yang dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.</p>
41	<p>Satuan Biaya Pencetakan Biaya pencetakan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.</p>
42	<p>Satuan Biaya Penjilidan Biaya penjilidan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.</p>
43	<p>Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru Penggantian inventaris maksimal 10 % dari jumlah pegawai (minimal 5 pegawai) sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.</p>
44	<p>Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Satuan biaya untuk pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga. Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasional harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sesuai kebutuhan, tidak mewah, hemat, efisien dan efektif. Untuk daerah terpencil satuan biaya <u>belum termasuk</u> ongkos kirim.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

45	<p>Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Mesin Fotokopi Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.</p>
46	<p>Sewa Ruang dan Gedung Pertemuan Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor. Definisi ruangan dan gedung pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 10 sampai dengan 299 orang.Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 5 sampai dengan 100 orang.Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang <p>Satuan biaya sudah termasuk meja, kursi, <i>sound system</i>, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.</p>
47	<p>Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none">Uang Harian Biasa dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal.Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-, Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,-.Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai peruntukannya yang diberikan secara <i>at cost</i>.
48	<p>Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal, Uang Makan, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Golongan A : Menteri, Ketua & Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pejabat Negara Lainnya yang setara- Golongan B : Duta Besar, Duta yang menjabat Kepala Perwakilan, Pejabat Eselon I, PNS Gol. IV/c ke atas, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Pejabat Lainnya yang setara- Golongan C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri yang setara- Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri.
49	<p>Satuan Biaya Tunjangan Beasiswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri (DI, DIII, DIV/S1) Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV atau Strata 1 dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.</p>
50	<p>Satuan Biaya Tunjangan Beasiswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri (S2/Sp-1 dan S3/Sp-2) Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Khusus bagi tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana untuk besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.

51 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. *Paket Full Board*

Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket fullboard mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, Makan (3 kali), Rehat Kopi dan Snack (2 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart, White Board, Standard Sound System, Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).

b. *Paket Full Day*

Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan snack (2 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart, White Board, Standard Sound System, Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).

c. *Paket Half Day*

Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan snack (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart, White Board, Standard Sound System, Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).

Catatan :

- a. Akomodasi = Pejabat Eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Kegiatan yang diselenggarakan secara *full board* dapat dilaksanakan di dalam kota maupun di luar kota
 - 1) Kegiatan yang diselenggarakan diluar kota, sepanjang akomodasi disediakan panitia, besaran uang hariannya adalah setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri.
 - 2) Kegiatan yang diselenggarakan didalam kota, dapat diberikan uang saku setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri.
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *full day* dan *half day* dilaksanakan di dalam kota, dengan ketentuan peserta diberikan uang transport setinggi-tingginya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang saku setinggi-tingginya 35 % (tiga puluh lima persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

52	<p>Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>a. Tarif hotel yang dicantumkan digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran. Untuk pelaksanaannya menggunakan metode <i>at cost</i>.</p> <p>b. Peruntukkan hotel berbintang :</p> <ul style="list-style-type: none">1) Hotel Bintang Lima : Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri, serta setingkat Menteri2) Hotel Bintang Empat : Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara Lainnya yang setara, Pejabat Eselon I serta Pejabat Eselon II3) Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III/Gol. IV4) Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV/Gol. III5) Hotel Bintang Satu : PNS Gol. II dan I <p>c. Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri), diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.</p> <p>d. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai.</p>
53	<p>Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas dalam Negeri</p> <p>Tarif taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.</p> <p>Indeks tarif taxi di propinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggán (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda</p>
54	<p>Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri</p> <p>Satuan biaya merupakan tarif transport perjalanan ke luar negeri <u>pulang pergi</u>.</p> <p>Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A- Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B- Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D <p>Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang <u>melebihi 8 jam</u> penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif Bisnis.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Catatan Umum :

- 1) Satuan biaya yang tercantum dalam PMK ini sudah memperhitungkan unsur pajak kecuali pada:
 - a) Diklat Pimpinan/Struktural,
 - b) Latihan Prajabatan
 - c) Pengadaan Bahan Makanan (yaitu khusus untuk bahan makanan non olahan/non pabrikaan).
- 2) Pengertian Istilah :
 - OJ : Orang/Jam
 - OH : Orang/Hari
 - OB : Orang/Bulan
 - OT : Orang/Tahun
 - OP : Orang/Paket
 - OK : Orang/Kegiatan
 - OR : Orang/Responden
 - Oter : Orang/Terbit



Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran,

[Handwritten Signature]
Ditjen Ratnawati
NIP. 131669947